KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Urusan Gorden DPR Makin Rame: Satu Rumah Dijatah 90 Juta, Ampun Deh...
Tanggal : Selasa, 29 Maret 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1-8

URUSAN GORDEN DPR MAKIN RAME

Satu Rumah Dijatah 90 Juta, Ampun Deh...

PENGADAAN gorden Rp 48 miliar untuk rumah dinas Anggota DPR di Kalibata, Jakarta, terus dikritik rakyat. Setjen DPR yang punya kerjaan ini, kemarin memberikan klarifikasinya. Namun, bukannya bikin rakyat adem, malah tambah jadi panas. Salah satu pemicunya, ternyata dari total anggaran itu, gorden satu rumah anggota DPR dijatah senilai Rp 90 juta. Angka ini dianggap kemahalan.

Usulan peremajaan gorden itu tercatat dalam situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, dengan kode tender 732087 yang dinamai Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata. Anggaran untuk pengadaan gorden ini mencapai Rp 48,7 miliar. Selain itu, dalam LPSE juga ada proyek pengaspalan Kompleks Parlemen senilai Rp 11 miliar. Sehingga totalnya menjadi Rp 59,7 miliar. Dua proyek ini diusulkan sejak 8 Maret lalu.

Saat ini, lelang pengadaan gorden itu dalam proses evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Tendernya, sudah diikuti 49 peserta, dan memiliki batas waktu hingga 11 April 2022 sampai tahap penandatanganan kontrak.

Sekjen DPR Indra Iskandar menjelaskan, anggaran Rp 48,7 miliar itu, dialokasikan untuk 505 unit rumah. Dengan harga rata-rata gorden satu unitnya sekitar Rp 80 juta hingga Rp 90 juta.

Tiap rumah, gorden itu digunakan untuk 11 ruangan. Rinciannya, lantai 1 yang terdiri dari jendela ruang

◆ BERSAMBUNG KE HAL 8

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Gorden Rumah Dinas DPR Belum Diganti Sejak 2015

Satu Rumah Dijatah

... DARI HALAMAN 1

tamu, 2 jendela ruang keluarga, 3 jendela ruang kerja, 4 jendela ruang tidur utama, 5 jendela dapur, 6 jendela tangga. Sementara, di lantai 2 untuk 2 jendela ruang tidur anak, jendela ruang keluarga, dan jendela ruang tidur asisten rumah tangga.

Soal desain, bahan, spesifikasi teknis, serta harga perkiraan, kata Indra, disusun konsultan perencana melalui proses unit pelayanan. Sayangnya, Indra tidak menjelaskan detail spesifikasi gorden. Indra hanya memastikan, gorden yang digunakan produk dalam negeri. Spesifikasi itu ditawarkan melalui proses tender.

"Jadi, pabrikan dalam negeri. Itu sudah masuk dalam spek. Siapa pun yang mau ikut lelang, silakan. Nanti semua data dukungnya tentu kami minta pabrikannya penggunaan bahannya, contohnya, karena lelang ini belum selesai prosesnya," ujar Indra.

Ia juga memastikan, proses pengajuan anggaran gorden ini sudah melalui proses pemeriksaan Inspektorat Utama DPR dan dibahas dengan Panja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Juga telah dilihat kelayakan harga pasar yang menjadi dasar pengajuan anggaran.

"Sebelum diajukan ke Kemenkeu (Kementerian Keuangan), mekanisme di DPR, di Sekretariat, juga melalui mekanisme beberapa kali pembahasan dengan Badan Urusan Rumah Tangga. Jadi, semua kegiatan itu, di samping di-*review* oleh Inspektorat Utama, juga dilakukan pembahasan yang sangat intensif dengan Panja BURT," urai Indra.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad setuju dengan penggantian gorden ini. Sebab, gorden Rumah Dinas DPR belum diganti sejak 2015. "Lihat saja tuh, gordennya sudah banyak yang nggak ada," ucap Ketua Harian Partai Gerindra ini.

Namun, dia ogah ikut campur dalam urusan teknis, seperti besaran anggaran hingga spesifikasi barang, dalam pengadaan gorden ini. Kata dia, penggantian gorden itu urusan Setjen DPR. "Masalah spek dan lain-lain, kami nggak ikut campur ya," imbuhnya.

Sementara, Anggota Komisi III DPR Habiburokhman keberatan dengan anggaran Rp 48,7 miliar penggantian gorden di rumah dinas Dewan. Menurutnya, anggaran tersebut terlalu berlebihan.

Sebagai penghuni rumah dinas DPR, Habiburokhman mengaku membeli gorden secara mandiri. Kata dia, paling mahal harga gorden kualitas terbaik untuk 1 rumah tidak lebih dari Rp 50 juta. "Terus terang kami merasa terganggu dengan penganggaran tersebut," ucap Waketum Gerindra itu.

Dia khawatir, pengadaan gorden ini justru membuat wajah DPR semakin tercoreng. Atas hal itu, dia meminta Setjen DPR membatalkan tender tersebut. "Berita tersebut bisa mencemarkan nama baik kami. Hal ihwal penganggaran tersebut memang bukan kewenangan kami secara teknis, tapi kami minta sebaiknya dibatalkan saja," ucapnya.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus tidak habis pikir dengan tingkah DPR ini. Menurutnya, anggaran Rp 48,7 miliar itu sangat fantastis hanya untuk sebuah gorden di rumah dinas DPR.

Ia memandang, pembelian gorden itu tidak mendesak. Apalagi tidak ada penjelasan masuk akal yang bisa membenarkan rencana pembelian gorden dengan total harga miliaran itu.

Dia menduga, ada kepentingan lain di balik proyek pembelian gorden itu. Modus pengadaan dengan motif proyek ini terjadi ketika anggaran dipakai tanpa tanggung jawab etis untuk kemaslahatan bangsa. "Hilangnya tanggung jawab etis membuat DPR tak punya beban untuk memakai anggaran sesuka hati seperti untuk membeli gorden yang kegunaannya sangat tak mendesak itu," ucap Lucius. ■ MEN